

Debt-for-Nature and Development Swaps: Peluang Penerapannya di Indonesia

Dipresentasikan kepada Bapak Menteri Negara
Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal

Jakarta, 14 September 2001

NRM/EPIQ Group
*Promoting Decentralized and Strengthened
Natural Resource Management
in Indonesia*

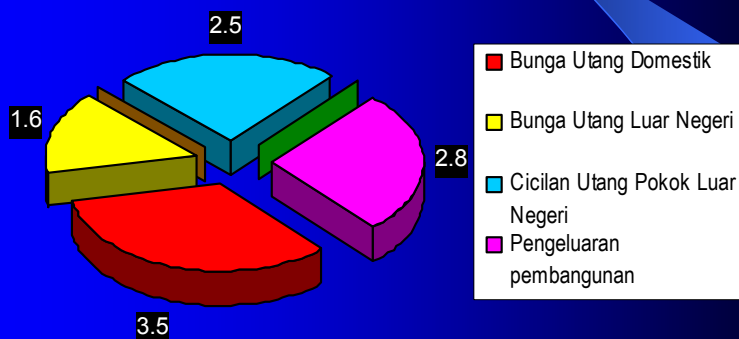
Batasan Sederhana

- ❖ *Debt-for-Nature Swap (DNS)* adalah suatu mekanisme pembatalan sebagian utang dengan cara menukarkannya dengan komitmen debitur untuk konservasi alam
- ❖ *Debt-for-Development Swap (DDS)* adalah suatu mekanisme pembatalan sebagian utang dengan cara menukarkannya dengan komitmen debitur untuk pembangunan

Mengapa DNS dan DDS Perlu Diterapkan di Indonesia?

- ❖ Lebih 38 persen dari pengeluaran RAPBN 2002 untuk bayar utang domestik dan luar negeri
- ❖ Hampir 45 persen penerimaan RAPBN 2002 untuk bayar utang
- ❖ Alokasi anggaran pembangunan hanya 2,8 persen terhadap PDB pada RAPBN 2002 (Rp 47,1 triliun)
- ❖ Anggaran konservasi alam di bawah US\$1 per hektar selama 10 tahun terakhir
- ❖ Lebih dari 80 juta rakyat Indonesia tergantung pada sumber daya hutan (deforestasi per tahun lebih dari 2 juta hektar)

Alokasi Anggaran RAPBN 2002 terhadap PDB (dalam persen)



Apa Manfaat DNS dan DDS bagi Arus Kas APBN

Komponen	Keunggulan Transaksi	Keuntungan
Masa Restrukturisasi	Masa pembayaran kembali utang dalam jangka waktu yang lebih panjang	Arus kas APBN dapat dikelola lebih baik
Denominasi Mata Uang Pinjaman	Berubah menjadi mata uang rupiah (local currency)	Tidak menghadapi resiko fluktuasi nilai tukar
Tingkat Suku Bunga	Tergantung pada negosiasi dan kondisi ketahanan debitur	Mengurangi beban APBN

Bagaimana DNS dan DDS dapat Merangsang Perekonomian Indonesia?

- ❖ Mengurangi beban APBN membayar utang dalam '*hard currency*'
- ❖ Sebagian kewajiban pembayaran bunga dan utang pokok dapat dibatalkan
- ❖ Menyisihkan sebagian anggaran untuk bayar utang bagi pembiayaan pembangunan dan konservasi alam domestik (daripada membayar utang 100%)
- ❖ Memperkuat APBN untuk peningkatan anggaran pembangunan dan konservasi alam

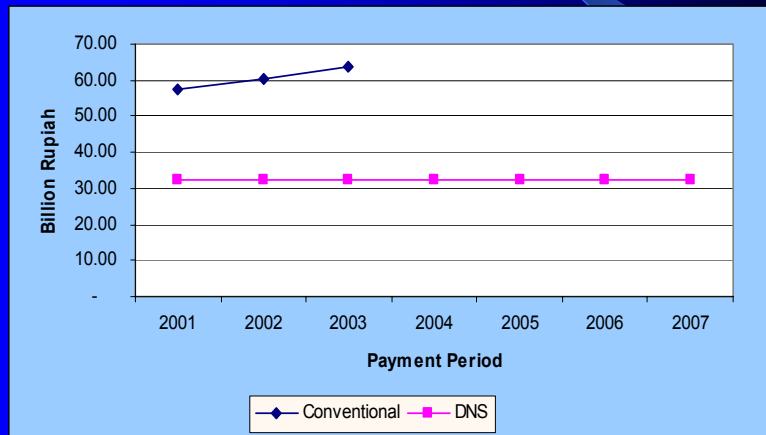
Bagaimana DNS dan DDS Bekerja: Kasus Akumulatif US\$500 Juta



Transaksi Debt-for-Nature Swap dalam Restrukturisasi Utang Komersil Pemerintah dan Swasta: Kasus US\$20 Juta



Restrukturisasi Utang Konvensional dan *Debt-for-Nature and Development Swaps*: Kasus US\$20 Juta Utang Komersil Pemerintah dan Swasta



Peluang '*Debt Consolidation*' Pemerintah Jerman

- ❖ Konversi utang DM 50 juta untuk perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan dan pendidikan
- ❖ Pemerintah RI mengalokasikan 50% dari DM 50 juta dalam mata uang rupiah sebagai '*local funds*' (50% utang dibatalkan)
- ❖ Mengurangi beban APBN dari membayar utang dan bunga bilateral kepada Pemerintah Jerman

Tahapan yang perlu dilakukan Pemerintah RI

- ❖ Melakukan redesain proses secara resmi kepada perwakilan Pemerintah Jerman di Jakarta
- ❖ Mengirimkan surat resmi Pemerintah RI melalui Menko Perekonomian kepada *German Embassy* di Jakarta
- ❖ Membuat Tim Kerja Khusus yang pembentukannya melalui Keppres
- ❖ Menyiapkan proposal kegiatan yang disepakati antar departemen dan kementerian negara
Mulai membangun proses internalisasi mekanisme keuangan DNS dan DDS dalam APBN

Peluang dari Pemerintah Amerika Serikat melalui *Tropical Forest Conservation Act (TFCA)*

- ❖ Mengurangi utang negara berkembang yang memiliki hutan tropis signifikan
- ❖ Memberikan diskon maksimal 40 persen dari harga utang
- ❖ Pemerintah Amerika Serikat akan melakukan pengurangan utang antara 1999-2001 sebesar US\$200 juta untuk seluruh negara pemilik hutan tropis

Tahapan yang Perlu Dilakukan Pemerintah RI

- ❖ Menindaklanjuti proses tahun 1998-1999, di mana pemerintah dengan bantuan USAID Jakarta dan 5 LSM sudah berupaya mendapatkan TFCA, tapi terlambat dan Pemerintah kurang serius
- ❖ Secara resmi mengirimkan surat ketertarikan Pemerintah RI kepada US Treasury
- ❖ Pemerintah RI melalui Keppres membuat Tim Kerja Khusus, dengan melibatkan Departemen Ekonomi dan Kementerian Negara Terkait
- ❖ Bekerjasama dengan USAID Jakarta dapat lebih mempercepat dan memperkuat proses.

Bagaimana Pemerintah Melihat Kedua Peluang Tersebut?

- ❖ Jerman menitikberatkan pada proteksi lingkungan, kemiskinan dan pendidikan (lebih prioritas)
- ❖ AS lebih terkonsentrasi terhadap pelestarian hutan tropis (sesuai komitmen Indonesia untuk CGI)
- ❖ Bagi Indonesia, fokus utama lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas Jerman karena proses sedang berjalan
- ❖ Jika fasilitas Jerman ini berhasil dicapai, pemerintah kreditur lainnya diyakini akan menyusul, seperti AS dan Swis

Bagaimana Pemerintah Memperkuat Peranan LSM?

- ❖ Beberapa LSM Nasional dan Internasional telah membentuk Komite Pengarah DNS dan DDS di Indonesia. Pemerintah dapat menggunakan komite ini
- ❖ Melibatkan LSM dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan proposal
- ❖ Pemerintah perlu menyampaikan komitmennya agar dana DNS dan DDS tidak menjadi sumber KKN baru